

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# Komnas HAM Gelar Mediasi Awal Maret

**JAKARTA, KOMPAS** — Warga eks Kampung Bayam melaporkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman Republik Indonesia karena ia tak kunjung merespons ajakan berdiskusi soal nasib mereka. Melihat berlarutnya kasus ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berencana menggelar mediasi antara eks warga Kampung Bayam dan Pemerintah Provinsi DKI pada 5 Maret 2024.

Salah satu warga eks Kampung Bayam, Madani Furkon, mengatakan, data yang diserahkan kepada Ombudsman telah lengkap, tetapi masih akan ada berkas susulan. "Yang kurang itu surat kuasa dari perwakilan warga yang melaporkan, surat tertulis yang kami kirimkan kepada penjabat gubernur yang tidak pernah direspons," kata Furkon, Rabu (21/2/2024).

Furkon mengatakan, warga eks Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka

dengan penjabat gubernur dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait nasib mereka yang belum mengantongi kunci Kampung Susun Bayam. Ia berharap, setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, Ombudsman RI dapat mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat.

Warga eks Kampung Bayam adalah penghuni lahan yang kini menjadi Jakarta International Stadium (JIS). Sebelumnya mereka dijanjikan dapat menempati rumah susun bernama Kampung Susun Bayam (KSB) di kawasan JIS saat ini.

Namun, pergantian kepemimpinan di DKI berujung dengan perubahan kebijakan terkait KSB. Warga eks Kampung Bayam bisa menempati KSB dengan kewajiban membayar sewa sesuai yang ditetapkan PT Jakarta Propertindo, pengelola JIS, dan KSB.

Warga eks Kampung Bayam keberatan karena syarat itu dinilai tidak sesuai dengan janji awal Pemprov DKI.

Terkait dengan berlarutnya kasus Kampung Bayam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga direncanakan menggelar mediasi antara eks warga Kampung Bayam dan Pemerintah Provinsi DKI, termasuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro), pada 5 Maret 2024.

Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo menyebut, belum lama ini, pihaknya berkunjung ke bangunan Kampung Susun Bayam untuk bertemu warga. Namun, kunjungan itu sebatas sosialisasi dan pemantauan Pemilu 2024, bukan penanganan kasus. Sebelumnya, eks warga Kampung Bayam pernah mengirimkan surat aduan kepada Komnas HAM pada 9 Januari 2024.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

mempersilakan Komnas HAM untuk menggelar mediasi antara warga eks Kampung Bayam dan Pemprov DKI. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara resmi dari pihak Komnas HAM. Namun, jika undangan tersebut telah tiba, ia akan menyerahkan mediasi tersebut kepada Jakpro. Heru menilai, KSB dan JIS kini sudah sepenuhnya dikelola Jakpro. "Belum mendapatkan informasi. Tapi, ya, silakan kalau mau mengundang mediasi," kata Heru di Balai Kota, Selasa (20/2).

Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bagi warga eks Kampung Bayam. Menurut rencana, pembangunan rumah susun itu akan dimulai pada Januari 2025 sehingga bisa selesai pada akhir 2025. Rumah susun tersebut ditujukan untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam. (TIK)